BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengembangan Masyarakat

1. Pengertian Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka.¹

Menurut Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Meriam, pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu.²

Sedangkan menurut Twelvetrees pengembangan masyarakat adalah *“the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.”*³ Artinya upaya untuk membantu orang-orang dalam meningkatkan kelompok mereka sendiri dengan cara melakukan usaha bersama-sama.

¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 4.

² *Ibid.*, hlm. 6

³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014) hlm. 38.

Maka dari itu, pengembangan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memungkinkan individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat memecahkan masalah-masalah sosial serta memiliki pilihan nyata yang menyangkut masa depannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Prinsip pengembangan masyarakat

Secara garis besar terdapat empat prinsip pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Pengembangan masyarakat menolak pandangan yang tidak memihak pada sebuah kepentingan (*disinterest*). Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berupaya untuk menampakkan nilai-nilai dan mengartikulasikannya secara jelas. Pada prinsip ini pengembangan masyarakat berkomitmen pada masyarakat miskin dan keadilan sosial, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemberdayaan dan penentuan diri sendiri, tindakan kolektif dan keanekaragaman.
- b. Mengubah dan terlibat dalam konflik. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini pengembangan masyarakat membangkitkan, menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu. Di sini pengembangan masyarakat melengkapi

kegiatannya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.

- c. Membebaskan, membuka masyarakat dan menciptakan demokrasi partisipatori. Pembebasan atau liberasi adalah reaksi penentangan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan, perbudakan dan penindasan. Pembebasan menuntut pemberdayaan dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa.
- d. Kemampuan mengakses terhadap program-program pelayanan kemasyarakatan. Pengembangan masyarakat menempatkan program-programnya dilokasi yang strategis dapat diakses oleh masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat memiliki suasana yang bersahabat dan informal, bukan suasana birokratis, formal dan tertekan.⁴

3. Manajemen Pengembangan Masyarakat

Program-program pengembangan masyarakat secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lapis bawah. Pengembangan masyarakat secara umum diaktualisasikan dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai langkah penanganan program kemasyarakatan. Program pengembangan masyarakat umumnya

⁴ *Ibid.*, hlm. 37-40.

menekankan penerapan *community-based management* (CBM). Yaitu pendekatan pengelolaan program yang menjadikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasarnya. CBM diartikan sebagai suatu strategi untuk mewujudkan praktik pembangunan yang berpusat pada manusia, pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Mereka sendiri yang mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi dan membuat keputusan demi mencapai kesejahteraan yang diimpikan.

Kebanyakan pekerja sosial menyusun kegiatan pengembangan masyarakat melalui beberapa langkah secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Ada enam tahap dalam melakukan perencanaan program diantaranya yaitu : **Pertama**, tahap *problem posing* (pemaparan masalah) yang dilakukan aktivis dengan mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dari kelompok sasaran. Masyarakat pada umumnya menyadari permasalahan yang dihadapi. Namun, hal itu tidak diungkapkan. Peran pekerja sosial dalam tahapan ini adalah memberi penjelasan, informasi dan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi diantara warga dari kelompok sasaran. **Kedua**, tahap *problem analysis* (analisis masalah).

Tahap ini pekerja sosial mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan menjadikan informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketiga, tahap penentuan tujuan (*aims*) dan sasaran (*objectives*). Tujuan menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang, dan *statement* tentang petunjuk umum. Contoh visi pengembangan masyarakat yang dirumuskan oleh pekerja sosial adalah pembentukan masyarakat dimana seluruh warganya terlibat secara aktif dalam program untuk mempertahankan sistem lingkungan dan membuat faktor sosial, ekonomi dan politik yang ada dapat menjamin persamaan secara maksimal dikalangan warga untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar dan pelayanan. Sementara sasaran lebih bersifat khusus dibandingkan tujuan. Pekerja sosial menetapkan apa yang menjadi kepercayaan dan apa yang akan dicapai kemudian menyusun proses dan tugas-tugas khusus. Sasaran yang ditetapkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan dapat diungkapkan secara jelas kepada warga. Sasaran mungkin berjangka panjang, menengah dan pendek. Sasaran jangka panjang secara umum menuntut sejumlah strategi berbeda-beda dan sering disusun dalam berbagai tahap. Sasaran jangka menengah dan pendek berskala lebih kecil lagi. Untuk memahami tujuan dan sasaran jangka panjang, menengah

dan pendek dipahami dari sesuatu yang luas ke spesifik, dari yang abstrak ke kongkrit.

Keempat, tahap *action plans* (perencanaan tindakan). Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. Dalam merencanakan aksi, pekerja sosial memerhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung, permasalahan-permasalahan *stakeholder*, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak-pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pemain-pemain kunci baik secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.

Kelima, tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap ini dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang. Para aktivis ketika berada dalam tahapan ini dituntut untuk memperhatikan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan.

Keenam, tahap evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial secara terus menerus, baik secara formal maupun semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan, dan bahkan harian.⁵

⁵ *Ibid.*, hlm. 83-86.

4. Strategi Pengembangan Masyarakat

Secara umum ada empat strategi pengembangan masyarakat yaitu:

a. *The growth strategy*

Strategi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis. Melalui pendapatan perkapita penduduk, produktivitas pertanian, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama di pedesaan.

b. *The welfare strategy*

Strategi kesejahteraan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat disertai dengan pembangunan kultur dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi sikap ketergantungan kepada pemerintah.

c. *The Responsitive Strategy*

Strategi ini dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.

d. *The Intergrated or Holistic Strategy*

Konsep perpaduan dari unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang

dibutuhkan yaitu mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.⁶

5. Fungsi Strategis Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat mempunyai fungsi strategis selain mampu memunculkan kesadaran juga potensial menguatkan kapasitas (*capacity buliding*) sehingga masyarakat berdaya keluar dari jerat kondisi keertinggalan, keterbelakangan, kemerosotan moral, ketunaan, kebodohan, ketakberdayaan dan kemiskinan. Beberapa fungsi strategis dari pengembangan masyarakat menurut Suharto yaitu:

- a. Memberikan pelayanan sosial yang berbasis kepada masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.
- b. Menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- c. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh

⁶ Moh Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 8-9.

deskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.

- d. Menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan termasuk memfasilitasi partisipasi warga agar aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.
- e. Meminimalisir kesenjangan dalam pemberian pelayanan, penghapusan deskriminasi dan ketelantaran melalui strategi pemberdayaan masyarakat.⁷

6. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Tujuan umum pengembangan masyarakat dapat menentukan proses dan orientasi pengambilan keputusan keberlanjutan kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa tujuan umum dari pengembangan masyarakat yaitu:⁸

- a. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang lebih berkeadilan.
- c. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya
- d. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata

⁷ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2014), hlm. 28-29.

⁸ *Ibid.*, hlm. 36-37.

- e. Meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di desa maupun kota
- f. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
- h. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- i. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
- j. Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- k. Memperkuat daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional yang kompetitif.
- l. Mengurangi angka pengangguran
- m. Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga *grass roots*.
- n. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.

- o. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- p. Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga *grass roots*.
- q. Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
- r. Memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak bergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.

7. Model Pengembangan Masyarakat

Jack Rothman mengembangkan tiga model yang berguna dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat yaitu :

a. Pengembangan masyarakat lokal (*locality development*)

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan ekonomi dan sosial bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.

b. Perencanaan sosial

Perencanaan sosial dimaksudkan untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk

(rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi) .

c. Aksi sosial

Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*), sumber (*distribution of resources*) dan pengambilan keputusan (*distribution of decision making*). Pendekatan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin sebab dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk merubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).⁹

Model pengembangan masyarakat juga diterapkan dalam ruang organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat

⁹ Edi suhart o, *Op. Cit., Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm. 42-44.

(LSM), dalam kegiatan pengembangan masyarakat LSM menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu:

a. *The Welfare Approach*

Pendekatan ini dilakukan dengan memberi bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu contohnya kepada mereka yang terkena musibah. Pendekatan ini kebanyakan dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan berupa pelayanan kesehatan, penyediaan makanan dan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

b. *The Development Approach*

Pendekatan yang dilakukan dengan cara memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan dengan tujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Pendekatan ini dijalankan melalui program pendidikan dan latihan bagi tenaga NGOs dan pemerintah yang berkecimpung pada bidang pengembangan masyarakat.

c. *The Empowerment Approach*

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Pendekatan *empowerment approach* bertujuan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat lapis bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan pada setiap bidang dan

sektor kehidupan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melindungi dan membela pihak yang lemah.¹⁰

B. Kuliah Kerja Nyata Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN MIT)

1. Pengertian KKN MIT

KKN Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN-MIT) merupakan KKN Mandiri yang program kegiatan, waktu, dan volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun oleh calon mahasiswa peserta KKN dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan atas persetujuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo. Mahasiswa membuat program perencanaan dalam bentuk proposal kemudian mengajukkannya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo. Lokasi yang menjadi mitra dampingan dipilih berdasarkan pada fenomena dan kebutuhan masyarakat.¹¹

Mahasiswa menyusun proposal secara lengkap yang berisi program kerja KKN beserta kebutuhan biaya. Kemudian, LP2M akan melihat kesiapan program dan biaya yang dibutuhkan. pada proses ini akan disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa. Program kerja KKN MIT yang diajukan oleh mahasiswa harus memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang seperti agama, ekonomi, kesehatan,

¹⁰ Zubaedi, *Op. Cit.*, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, hlm. 120-121.

¹¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang*, Tahun 2016, hlm. 2-3.

pendidikan dan infrastruktur untuk menjawab problematika yang ada dalam masyarakat sebagai calon mitra dampingan secara mandiri. Pelaksanaan KKN MIT dilakukan oleh mahasiswa dengan biaya sepenuhnya menjadi beban mahasiswa peserta KKN. Mahasiswa diberi kebebasan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur dan pihak-pihak lain dengan sepengatuhuan LP2M.¹²

2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN MIT)

Mahasiswa peserta KKN yang akan mengikuti KKN Mandiri diharuskan mengikuti empat tahap kegiatan, yaitu; persiapan, pembekalan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil KKN Mandiri sekaligus evaluasi terhadap KKN Mandiri yang telah dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:¹³

a) Persiapan KKN-MIT

1) Pendaftaran Peserta KKN-MIT

(a) Mahasiswa yang berhak untuk mendaftar KKN Mandiri adalah mereka yang telah lulus sekurang-kurangnya 120 SKS dibuktikan dengan transkrip nilai sementara yang sah.

(b) Mahasiswa membayar komponen biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

(c) Pendaftaran peserta KKN-MIT dilayani sesuai jadwal yang ditentukan oleh LP2M.

¹² *Ibid.*, hlm. 3.

¹³ *Ibid.*, hlm. 17-19.

- (d) Peserta KKN-MIT boleh mengambil mata kuliah pada semester berjalan, dengan syarat pelaksanaan KKN Mandiri tidak mengganggu kegiatan perkuliahan.
- (e) Calon peserta KKN-MIT adalah kelompok mahasiswa yang terdiri dari 10 sampai dengan 15 orang, yang berasal paling sedikit dari dua program studi atau jurusan yang berbeda, baik dalam satu fakultas atau lintas fakultas di UIN Walisongo.
- (f) Calon peserta KKN-MIT saat mendaftar diwajibkan mengajukan proposal rencana kegiatan KKN-MIT kepada LP2M UIN Walisongo yang mencakup minimal hal-hal sebagai berikut: latar belakang, laporan hasil observasi (kondisi mitra pengabdian saat ini dan permasalahan yang dihadapi mitra pengabdian), manfaat KKN-MIT, program kerja yang akan dilaksanakan dan kondisi mitra pengabdian yang diharapkan, metode pelaksanaan, rencana anggaran biaya, dan lampiran-lampiran pendukung lainnya.
- (g) LP2M UIN Walisongo akan menjadwalkan seminar proposal KKN-MIT yang telah diusulkan oleh mahasiswa setelah proposal diterima oleh LP2M, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Seluruh mahasiswa pengusul proposal wajib hadir dan menyampaikan paparannya di depan tim penilai atau *reviewer* yang ditunjuk oleh LP2M UIN Walisongo.

- (2) Evaluasi proposal meliputi beberapa aspek kesesuaian proposal dengan kebijakan umum UIN Walisongo, kesesuaian program kerja dengan disiplin ilmu pengusul, biaya KKN Mandiri, alokasi waktu, dan kapasitas dukungan dari pihak lain.
- (3) Hasil evaluasi proposal akan menggambarkan tiga hal, pertama, proposal diterima. Kedua, proposal diterima bersyarat dan ketiga proposal ditolak.
- (4) Keputusan diterima atau ditolak menjadi kewenangan LP2M UIN Walisongo, berdasarkan rekomendasi dari TIM penilai.
- (5) Apabila proposal diterima bersyarat, maka mahasiswa pengusul akan diberikan waktu untuk memperbaiki proposal maksimal satu minggu sejak keputusan diberikan.

2) Penentuan Lokasi KKN-MIT

- (a) Lokasi KKN-MIT diusulkan oleh mahasiswa kepada LP2M UIN Walisongo.
- (b) Penentuan lokasi KKN-MIT didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kemampuan mahasiswa.
- (c) Lokasi KKN-MIT juga dapat ditentukan atas usulan jajaran pimpinan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo yang telah memiliki jaringan kerjasama dengan pihak lain.

(d) Jangkauan wilayah KKN-MIT meliputi Lembaga kemasyarakatan tingkat dusun atau RW, komunitas masyarakat tertentu, desa atau kelurahan, dan kecamatan.

3) Persetujuan KKN-MIT

Apabila proposal KKN Mandiri yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan diterima, maka LP2M UIN Walisongo akan memberikan surat persetujuan KKN Mandiri untuk kemudian melaksanakan tahapan KKN Berikutnya.¹⁴

b) Pembekalan KKN-MIT

1) Peserta Pembekalan

(a) Calon peserta pembekalan KKN-MIT adalah mahasiswa yang dinyatakan telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai peserta KKN-MIT oleh LP2M UIN Walisongo.

(b) Kegiatan Pembekalan KKN-MIT merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan KKN secara keseluruhan, oleh karenanya semua calon peserta KKN-MIT harus hadir mengikuti pembekalan.

2) Tujuan Pembekalan

(a) Memberikan bekal pengetahuan sosial kemasyarakatan, baik mengenai problematika, pendekatan maupun

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

pemecahannya, serta keterampilan praktis kepada calon peserta KKN yang dapat dimanifestasikan di lokasi.

- (b) Menciptakan kondisi siap mental, fisik dan konseptual bagi calon peserta KKN sebelum diterjunkan di lokasi KKN.
- (c) Menyiapkan rancangan pelaksanaan program kerja KKN.¹⁵

3) Materi dan Waktu Pembekalan

- (a) Materi pembekalan KKN merupakan paket pendidikan dan latihan yang disesuaikan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan program KKN-MIT yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa.
- (b) Materi pembekalan KKN Mandiri terdiri dari tiga komponen yang menjadi satu kesatuan, yaitu materi yang bertujuan untuk memantapkan kepribadian, memperluas dan memperkaya cakrawala pengetahuan tentang berbagai masalah, serta kemampuan dalam memecahkan masalah secara sistematis yang muncul pada waktu KKN-MIT berlangsung.
- (c) Jadwal acara pembekalan sepenuhnya diatur oleh LP2M UIN Walisongo.

4) Nara sumber dan Metode Pembekalan

- (a) Nara sumber pembekalan terdiri dari pimpinan UIN Walisongo, LP2M, para pakar, dan lembaga lain yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 21

relevan dengan tujuan pembekalan maupun tema KKN-MIT.

(b) Metode yang digunakan dalam pembekalan KKN-MIT adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan *role playing*.

5) Tata tertib Pembekalan

(a) Mahasiswa peserta KKN-MIT wajib mengikuti kegiatan pembekalan dari awal sampai akhir acara.

(b) Bagi peserta yang berhalangan hadir wajib memberitahu LP2M dengan menyertakan surat izin yang diketahui DPL, dan bagi yang berhalangan hadir karena sakit diwajibkan melampirkan surat keterangan dokter.

(c) Mahasiswa KKN-MIT wajib mengenakan pakaian yang rapi, sopan dan bersepatu.

(d) Dosen pembimbing lapangan KKN Mandiri wajib mendampingi proses pembekalan KKN Mandiri.

(e) Jadwal, acara, materi, dan narasumber pembekalan KKN sepenuhnya merupakan kewenangan LP2M UIN Walisongo untuk mengaturnya

c) Pelaksanaan KKN MIT

1) Ketua LP2M UIN Walisongo memberikan surat tugas kepada mahasiswa peserta KKN untuk melaksanakan kegiatan KKN-MIT.

- 2) Pelaksanaan KKN-MIT diawali dengan pelepasan oleh ketua LP2M atas nama Rektor UIN Walisongo.
- 3) Waktu pelepasan disesuaikan dengan jadwal yang telah diatur oleh LP2M UIN Walisongo.
- 4) Kegiatan KKN-MIT dilaksanakan dengan mengacu pada proposal KKN-MIT yang telah disetujui dalam seminar proposal KKN-MIT.
- 5) Program kerja yang tertuang dalam proposal yang telah disetujui dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan kenyataan di lokasi KKN-MIT dengan persetujuan DPL dan LP2M.
- 6) Dalam pelaksanaan KKN-MIT, mahasiswa diizinkan untuk melaksanakan tambahan kegiatan yang berasal dari lembaga pemerintah dan lainnya (masyarakat), selama tidak bertentangan dengan kepentingan pembelajaran dan tidak mengurangi keberhasilan program kerja KKN-MIT yang telah direncanakan.
- 7) Dalam pelaksanaan kegiatan KKN-MIT, mahasiswa didampingi oleh seorang DPL, yang akan memberikan pengarahan dan bimbingan.
- 8) Pelaksanaan KKN-MIT di lokasi minimal 45 hari (empat puluh lima) hari.

- 9) Mahasiswa peserta KKN-MIT wajib mengisi buku kegiatan yang telah disediakan oleh LP2M UIN Walisongo, dan DPL berkewajiban untuk menganalisa tingkat keaktifan mahasiswa selama masa KKN.
 - 10) Mahasiswa KKN Mandiri wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo, berikut norma etika yang berlaku di masyarakat.
 - 11) LP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan KKN-MIT.
 - 12) Setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN-MIT selama waktu yang telah ditentukan, mahasiswa akan ditarik kembali oleh DPL atas nama LP2M UIN Walisongo.
 - 13) Waktu penarikan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh LP2M UIN Walisongo.
- d) Pelaporan dan Evaluasi KKN-MIT
- 1) Mahasiswa wajib menyusun laporan kinerja pelaksanaan KKN-MIT dan dimintakan persetujuan DPL dan pimpinan lembaga atau institusi tempat diselenggarakannya KKN-MIT.
 - 2) Laporan kinerja pelaksanaan KKN-MIT diserahkan ke LP2M paling lambat tujuh hari kalender terhitung sejak KKN berakhir.

- 3) LP2M menyelenggarakan seminar hasil kinerja pelaksanaan KKN-MIT sebagai forum evaluasi dan kemungkinan rencana tindak lanjut.
- 4) DPL dan pimpinan lembaga atau institusi tempat diselenggarakannya KKN-MIT memberikan penilaian terhadap setiap mahasiswa peserta KKN-MIT.
- 5) Setelah KKN-MIT selesai dilaksanakan, DPL dan LP2M akan melaksanakan rapat evaluasi yang mencakup dua agenda yaitu; Pertama, tingkat keberhasilan KKN-MIT yang telah selesai dilaksanakan. Kedua, tingkat kepentingan penerjuran KKN-MIT lanjutan pada lokasi yang sama.
- 6) Apabila mahasiswa peserta KKN MIT dinyatakan lulus maka LP2M akan memberikan sertifikat KKN.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 24-25.